

ABSTRAK
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KOPERASI WANITA
MENURUT UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (STUDI KASUS KOPERASI
WANITA NURUL JANNAH DAN KOPERASI WANITA ANGGREK
KECAMATAN KOTA SUMENEP).

Oleh : Rahmat Salam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa salah satu bentuk lembaga ekonoini yang sesuai dengan amanat ayat 1 Pasal 33 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah koperasi. Koperasi bertujuan untuk memanfaatkan seluruh kemampuan anggota dan muaranya adalah kesejahteraan anggota-anggotanya berdasarkan seberapa besar kontribusinya kepada koperasi. Koperasi dapat beranggotakan orang-seorang yang memiliki jenis kelamin laki- laki dan perempuan, bahkan juga bisa beranggotakan wanita secara keseluruhan. Dalam perkembangannya lebih lanjut jenis koperasi ini disebut sebagai koperasi wanita.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana tanggung jawab hukum pengurus koperasi wanita Nurul Jannah dan koperasi wanita Anggrek Kecamatan Kota Sumenep dan bagaimana ketentuan hukum mengatur jika terjadi hubungan keluarga dalam kepengurusan koperasi berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992? Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pengurus koperasi wanita Nurul Jannah dan koperasi Anggrek wanita Kecamatan Kota Sumenep, dan Untuk mengetahui hukumnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 bisa terjadi hubungan keluarga dalam kepengurusan koperasi.

Penelitian tentang Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Wanita Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Kasus Koperasi Wanita Nurul Jannah Koperasi Wanita dan Anggrek Kecamatan Kota Sumenep) adalah Empiris yaitu adalah penelitian berdasarkan data-data dan fakta—fakta yang ada di lapangan Koperasi Wanita Nurul Jannah dan Koperasi Wanita Anggrek Kecamatan Kota Sumenep berdasarkan data-data primer dari dokumen bahan wawancara, dan data sekunder yang berkaitan dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUICM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, serta petunjuk teknis dan surat edaran Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep.

Hasil penelitian pada Koperasi Wanita Nurul Jannah, sejak berdiri tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga, Tidak memiliki Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Koperasi (RK, RAPB) Tidak memiliki neraca keuangan tiap tahun buku, Pengurus koperasi wanita Nurul Jannah tidak menyusun laporan pertanggungjawab tahun buku 2018, Pengurus koperasi tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2018, Pengurus tidak menyusun Rincian Sisa Hasil Usaha, dan Ketua koperasi tidak aktif, pengurus yang lain dan pengawas tidak segera mengadakan rapat anggota untuk restrukturisasi pergantian ketua. Hasil temuan pada Koperasi Wanita Anggrek

adalah sejak berdiri tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga, Sejak berdiri tidak memiliki Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Koperasi (RK, RAPB), Sejak berdiri tidak memiliki neraca keuangan tiap tahun buku, Pengurus koperasi wanita Anggrek tidak menyusun laporan pertanggungjawab sejak tahun buku 2010, Pengurus koperasi tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sejak berdiri sampai tahun buku 2018, Sejak berdiri pengurus tidak menyusun Rincian Sisa Hasil Usaha, dan Kepengurusan dan pengawas yang tidak aktif menjalankan tugas dan fungsinya secara keseluruhan, dan terjadi ada hubungan keluarga karena dalam pemilihan pengurus karena tidak ada anggota yang bersedia untuk menjadi bendahara sehingga menunjuk keluarga semenda (keponakan dari suami ketua) yang sanggup menyusun dan membuat laporan keuangan pada anggota.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Tanggung jawab hukum pengurus Koperasi Wanita Nurul Jannah berdasarkan pada Badan Hukum Koperasi No. 188.4/154/BH/XVI.26/435.111/2009, Anggaran Dasarnya sesuai dengan pasal 47, dan wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun buku. Tanggung jawab hukum Koperasi Wanita Anggrek berdasarkan pada badan hukum koperasi No. 188.4/194/BH/XVI.26/435.101/2010 pada tanggal 04 Januari 2010, pengurus dan pengawas non aktif dan tidak melaksanakan RAT sejak berdiri sampai tahun buku 2018. Kepada pengurus Koperasi Wanita Nurul Jannah adalah pengurus dan pengawas aktif kembali dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep. Kepada pengurus Koperasi Wanita Anggrek untuk melaksanakan rapat anggota membahas pembubaran dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep.

Kata kunci : tanggung jawab hukum, undang undang, koperasi

ABSTRACT

Legal Responsibilities of Women's Cooperatives' Administrators According to the Law of Republic Indonesia Number 25 on 1992 about Cooperatives. (Study Case in Nurul Jannah Women's Cooperative and in Anggrek Women's Cooperative Sumenep City District).

By: Rahmat Salam

One form of economic institution that accordance with mandate subsection 1 Clause 33 the 1945 of the Republic Indonesia Constitution was cooperative. The cooperative aims to utilize all members' capabilities and its estuary was the members' welfare based on how much their contribute to cooperative. Cooperative can be composed by men and women, even all women as mayority. In further development, type of this cooperative was called as women's cooperative.

Formulation of the problem are how does legal responsibilities of the Nurul Jannah Women's Cooperative and the Anggrek Women's Cooperative in Sumenep City District and how does the law regulate about family relations in the cooperative management based on Constitution Number 25 on 1992 ? The purposes of this study are know about legal responsibilities on Nurul Jannah Women's Cooperative and Anggrek Women's Cooperative in Sumenep City District, and know about amarcement based on Constitution Number 25 on 1992 if there was family relationship at cooperative management.

Study about Legal Responsibility of Women Cooperative Administrative According Republic Indonesia Constitution Number 25 on 1992 concern Cooperatives (Study Case on Nurul Jannah Women's Cooperative and Anggrek Women's Cooperative at Sumenep City District) is Empirical study based on primary data (interview) and secondary data (related to Constitution Number 25 on 1992, Minister of Cooperatives and Small Medium Enterprises Regulation Republic Indonesia Number 10/Per /M.KUKM/IX/2015 concern Cooperative Institutions, then technical instructions and leaflet by Head of Sumenep Regency Cooperative and Small Medium Enterprises (SME).

The results on the Women's Cooperative Nurul Jannah study case, are It didn't has bylaw, Work Plan, Budget and Revenue Plan then it didn't has yearly balance sheet, hasn't prepared financial reporting on 2018, didn't yearly member assembly in fiscal year 2018, Management does not compile Details of Remaining Operating Results, and Chairperson of the cooperative is not active, other management and supervisors do not immediately hold a member meeting to restructure the change of chair. The findings of the Anggrek Women's Cooperative are that since they were established they did not have a Household Budget, Since they did not have a Work Plan, Budget Plan and Revenue for Cooperative Expenditures (RK, RAPB), Since they were established they did not have a financial balance every financial year, the Anggrek women's cooperative management did not prepare accountability report since the 2010 financial year, the cooperative's management did not carry out an annual member meeting (RAT)

from its establishment until the fiscal year 2018, since its establishment the management did not compile Details of Operating Results, and Management and supervisors who did not actively carry out their duties and functions as a whole, and occurred there is a family relationship because in the election of the management because there are no members who are willing to become treasurers so appoint a family semenda (nephew of the chairman's husband) who is able to compile and make financial reports on members.

The conclusion from the results of this study is that the legal responsibility of the Nurul Jannah Women's Cooperative management is based on the Cooperative Legal Entity No. 188.4 / 154 / BH / XVI.26 / 435.111 / 2009, its Articles of Association are in accordance with article 47, and are required to conduct an Annual Member Meeting (RAT) each financial year. The legal responsibilities of the Anggrek Women's Cooperative are based on the cooperative legal entity No. 188.4 / 194 / BH / XVI.26 / 435.101 / 2010 On January 4, 2010, the management and supervisors were not active and did not carry out the RATs since they were established until the fiscal year 2018. To the management of the Women's Cooperative Nurul Jannah is an active management and supervisor again and coordinated with Sumenep Regency Cooperative and SME Office. To the management of the Anggrek Women's Cooperative to hold a member meeting discussing the dissolution and coordinating with the Sumenep Regency Cooperative and UKM Office.

Keywords: legal responsibility, statute, cooperative